

## Analisis Narasi Anies Baswedan Pada Kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 Dalam Perspektif Norman Fairclough

Jihan Auliana Ghaisani<sup>1</sup>, Luthfi Hamzah Husin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran

ljihan19009@mail.unpad.ac.id <sup>2</sup>l.h.husin@unpad.ac.id

Dikirim: 13 Juni 2022 Direvisi: 20 Juni 2022 Diterima: 30 Juni 2022

### Abstrak

Pemilihan umum menjadi ajang kontestasi bagi aktor politik untuk berlaga meraih simpatisan masyarakat. Terdapat berbagai macam fenomena sosial yang dapat dianalisis secara lebih dalam kampanye menjelang pemilihan umum berlangsung. Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta tahun 2017 telah menjadi ajang kontestasi politik yang menarik untuk dibahas secara lebih lanjut. Anies Rasyid Baswedan yang umumnya dikenal memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan menggunakan suara gerakan Islam, namun kemenangannya di satu sisi tidak terlepas dari gerakan non-Islam seperti halnya warga Jakarta yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Penulis di sini akan membedah narasi Anies Baswedan pada debat terbuka menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui pendekatan dari perspektif analisis wacana Norman Fairclough.

**Kata kunci:** analisis diskursus, pemilihan umum, populisme

### Abstract

*The general election is a contestation arena for political actors to compete for community empathy. There are various kinds of social phenomena that can be analyzed in more detail in the campaign ahead of the general election. The regional head election (Pilkada) in DKI Jakarta in 2017 has become an interesting political contestation event to be discussed further. Anies Rasyid Baswedan who is generally known to have won the 2017 DKI Jakarta Pilkada by using the voice of the Islamic movement, but his victory on the one hand cannot be separated from non-Islamic movements such as Jakarta residents who live along the banks of the Ciliwung River. The author here will dissect Anies Baswedan's narration in the open debate ahead of the 2017 DKI Jakarta Pilkada through an approach from the perspective of Norman Fairclough's discourse analysis.*

**Kata kunci:** discourse analysis, general election, populism

### PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan, Jakarta ditetapkan menjadi ibukota dari negara Indonesia yang telah dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Berangkat dari predikat tersebut, Jakarta sebagai wilayah administratif menyandang daerah khusus sekaligus dipandang sebagai sebuah harapan bagi banyak masyarakat Indonesia sebab banyak tumpuan yang ditopang Jakarta demi menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih maju.

Berbagai macam pembangunan infrastruktur yang masif hingga kebijakan yang bersifat nasional secara berkala terlahir di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Tidak hanya itu, perkembangan Indonesia yang berpusat di Jakarta turut diiringi oleh pesatnya perekonomian yang disokong oleh berbagai perusahaan dari tingkat firma hingga berskala masif layaknya korporat telah menjadikan Jakarta sebagai basis utama bisnisnya. Melihat hal ini, tidak sedikit masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia berkunjung bahkan hingga merantau demi mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Jakarta sebagai ibukota dinilai sebagai daerah yang lebih stabil secara moneter serta aman dari ancaman asing sehingga menjadi daya Tarik yang memikat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga memilih untuk menetapkan kehidupannya.

Di samping cerahnya stabilitas di Jakarta dalam menggerakkan roda kemajuan Indonesia, terdapat permasalahan yang turut eksis seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2010 hingga 2014 memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 2010, DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 14.518 jiwa/km<sup>2</sup> dan mengalami kenaikan menjadi 15.173 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2014. Sementara dalam rentang waktu yang sama dengan wilayah yang berbeda, Provinsi Papua pada tahun 2010 memiliki tingkat kepadatan penduduk sebanyak 9 jiwa/km<sup>2</sup> dan hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi 10 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2014. Padahal apabila ditinjau secara geografis, Papua merupakan provinsi dengan wilayah yang paling luas dibandingkan dengan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan luas wilayah paling kecil. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di wilayah Jakarta termasuk pada klasifikasi sangat padat, yakni lebih dari 400 jiwa/ha apabila mengacu pada hasil penelitian Puslitbang Permukiman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2011.

Kondisi ini menjadi suatu fenomena yang serius, terutama bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatur penduduknya. Pasalnya dengan wilayah yang relatif kecil, Jakarta harus dapat menopang kehidupan sekitar 10 juta jiwa yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, meskipun kota satelit disekitar wilayah DKI Jakarta yang terdiri atas Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) mulai mengalami perkembangan, namun ketidakjelasan peraturan terkait transmigrasi penduduk masih belum ditegakkan secara utuh. Masyarakat yang datang dari berbagai daerah dapat terus bermukim di Jakarta tanpa diharuskan memiliki tujuan pasti seperti kehidupan finansial dan tempat tinggal. Akibatnya, banyak masyarakat yang beraktivitas di tempat yang tidak seharusnya. Seperti halnya berjualan di sepanjang trotoar hingga bermukim di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Permukiman tersebut tergolong liar dan kerap memicu permasalahan baru seperti halnya kebakaran, penumpukan sampah, hingga banjir yang telah menjadi bencana rutin setiap tahunnya bagi warga Jakarta.

Apabila melihat sejenak kilas balik ibukota dari aspek historis, Jakarta yang dahulu dikenal sebagai Batavia telah memiliki riwayat banjir sejak pra kolonialisme Belanda, khususnya pada masa Kerajaan Purnawarman. Hal ini dibuktikan melalui tulisan yang tertera pada Prasasti Tugu yang menyatakan kondisi lingkungan perairan di Batavia memiliki sistem

drainase sungai yang buruk. Permasalahan banjir terus melanda Jakarta dari kolonialisme Belanda hingga pra kemerdekaan Indonesia. Selama puluhan dekade dan berganti kepemimpinan, Ibukota yang seharusnya menjadi pilar utama perekonomian dan wajah dari Indonesia pada realitanya belum bisa mengatasi banjir. Bahkan, banjir bandang pernah dialami oleh warga Jakarta pada tahun 2007 yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian wilayah maupun nasional.

Kembali menimbang permukiman liar sebagai suatu permasalahan, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengeluarkan kebijakan yang bersifat menertibkan permukiman liar berupa normalisasi Sungai Ciliwung. Adapun normalisasi sungai tersebut merupakan upaya yang dilakukan terhadap badan sungai sehingga kapasitas badan sungai sesuai dengan debit air. Hal ini mengacu sesuai dengan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013-2017, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, serta Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012. Dengan adanya dasar dalam upaya normalisasi sungai, menjadikan masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai mengalami penggusuran. Tindakan penggusuran ini didasari pada produk hukum Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016 tentang penertiban penggunaan lahan tanpa izin dari pihak yang berhak.

Normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ialah salah satu upaya pemerintah guna mengurangi resiko bencana banjir yang telah melanda ibukota selama menahun lamanya. Namun di sisi lain, kebijakan normalisasi sungai justru turut mengundang kontroversi dari warga bantaran sungai yang tergusur. Berdasarkan laporan yang bersumber dari laman [megapolitan.kompas.com](http://megapolitan.kompas.com) pada 26 Januari 2019, penggusuran telah dilakukan sebanyak 523 penggusuran sepanjang tahun 2014 hingga 2019. Adapun penggusuran pada tahun 2014 telah menimbulkan korban sebanyak 3.752 keluarga dan 3.513 bangunan serta pada tahun 2015 penggusuran dilakukan kepada 6.283 unit usaha dengan jumlah korban sebesar 8.145 jiwa. Penggusuran terus berlanjut hingga tahun 2018 yang berdampak terhadap 277 keluarga dan 864 unit usaha (Muhtadi & Anggara, 2019). Sedangkan lokasi penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta, khususnya permukiman yang berada di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung seperti Bukit Duri, Kampung Pulo, Bidara Cina, dan sebagainya.

Menanggapi penggusuran yang marak di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan selaku Calon Gubernur DKI Jakarta melakukan upaya pendekatan kepada warga bantaran sungai yang mengalami penggusuran. Anies Baswedan mengeluarkan wacana terkait naturalisasi sungai, yang dinilai memiliki konsep yang berbanding terbalik dengan normalisasi sungai dari Ahok. Melihat fenomena ini, penulis akan menganalisis narasi Anies dalam memandang penggusuran. Perspektif Anies yang berbeda dalam menanggapi permukiman liar yang telah menjadi fenomena ibukota dan menjadi suatu penelitian yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Hal ini dapat dilihat dari narasi Anies Baswedan yang bersifat populis dan memiliki perspektif yang berlainan khususnya terkait konsep permukiman dan penggusuran. Penulis melakukan pendekatan melalui teori analisis wacana yang digagas oleh Norman Fairclough guna melihat bahasa yang digunakan oleh Anies Baswedan sebagai praktik kekuasaan.

## **Populisme**

Tidak sedikit tokoh masyarakat menggunakan isu populis sebagai manuver politik terlebih menjelang kampanye pada pemilihan umum. Anies Baswedan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 menggunakan isu populis guna menyuarakan masyarakat yang mengalami penggusuran seperti yang terjadi di sepanjang sungai Ciliwung dalam rangka normalisasi sungai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Populisme sendiri ialah daya Tarik kepada *'the people'* atau rakyat, terhadap struktur kekuasaan yang mapan dan ide-ide dan nilai-nilai masyarakat yang dominan. Konsep ini turut mengklaim legitimasi dengan alasan bahwa populisme berbicara untuk rakyat, dan mewakili kedaulatan demokratis, bukan kepentingan bagian seperti kelas ekonomi (Canovan, 1999).

Dengan wacana yang lebih sederhana, Mudde mendeskripsikan populisme sebagai sesuatu tentang hubungan antara 'elite yang korup' dengan 'rakyat suci'. Dalam rangka menentang penindasan kaum elite, maka masyarakat membutuhkan seorang aktor politik yang cukup berani untuk berdiri bagi 'the people' atau rakyat. Barometer kesuksesan dari seorang aktor politik tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan umum terhadap pemimpin partai yang kuat serta komunikasi yang lebih langsung antara pimpinan partai serta pendukung partai – yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir (Mudde, 2004).

Dalam upaya mengkomunikasikan wacana populis tersebut, terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan oleh aktor politik. Adapun ketiga elemen tersebut diantaranya yakni pertama, referensi kepada *'the people'* atau rakyat. Berdasarkan penuturan dari Moffit dan Tormey (2014), setiap individu dapat memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap suatu hal; sehingga ketidakjelasan wacana ini dapat memungkinkan seorang populis untuk meyatukan audiens yang beragam di bawah satu label tertentu. Kedua, adanya kontradiksi terhadap elite yang 'korup'. Dengan adanya konstruksi pertentangan terkait elite yang korup dengan rakyat, hal ini secara eksplisit dapat menegaskan pemegang kekuasaan, jabatan, maupun pendukung sistem saat ini. Populisme anti-elitisme ialah retorika yang digunakan oleh aktor politik saat hendak mencoba untuk mendapatkan pengaruh dalam sistem politik dan membangun sebuah pengakuan nama. Sedangkan elemen populisme yang perlu diperhatikan terakhir ialah keberanian untuk tampil berbeda, meskipun perilaku tersebut kerap dinilai kurang pantas di tengah budaya masyarakat yang ada. Perspektif komunikasi politik berpendapat bahwa membangun rasa identitas sosial yang spesifik adalah inti dari populisme. Hal ini bermanfaat dalam membangun komunikasi yang efektif serta mendefinisikan kelompok antara kelompok dalam yakni orang baik dan membangun kelompok luar yakni minoritas bermasalah yakni elite yang mementingkan diri sendiri (*de Vreese et al.*, 2018).

Sedangkan ditinjau dari perspektif implementasinya, populisme terbagi menjadi beberapa fenomena yang lebih spesifik. Adapun fenomena *mainstream* dari populisme yakni *radical-left populism*, *right-wing radical populism*, dan *autocratic-leaning populism*. Dalam artikel ini, fenomena kampanye Anies Baswedan berfokus terhadap *radical-left populism*. Yakni pembawaan isu masyarakat yang termarginalkan khususnya penggusuran permukiman warga bantaran Sungai Ciliwung (Mudde, 2004).

## **Analisis Diskursus**

Eksistensi dari analisis diskursus tidak lain terikat dari adanya bahasa. Bahasa sendiri digunakan untuk berbagai fungsi yang baik secara langsung ataupun tidak, memiliki

konsekuensi yang sangat beragam. Sebab, setiap pihak memiliki maksud, tujuan, hingga kepentingan tertentu yang tersirat dalam menyampaikan suatu bahasa. Padahal, bahasa sendiri kerap bersifat heterogen serta ambigu akibat konfigurasi dari hasil wacana yang berbeda bagi pihak yang memproduksi dan menafsirkannya. Berangkat dari pemahaman ini, individu perlu memiliki sikap kritis dalam menafsirkannya melalui analisis wacana kritis.

Berdasarkan argumen dari Norman Fairclough (1992), suatu diskursus bersifat konstruktif secara sosial, yakni merupakan akibat dari adanya interaksi antara subjek sosial, hubungan sosial, dan sistem pengetahuan dan kepercayaan. Dalam hal ini, analisis diskursus berfokus terhadap efek ideologis konstruktifnya.

Sedangkan menurut David Howarth, analisis wacana mengacu pada proses menganalisis praktik penandaan sebagai bentuk diskursif. Hal ini mengindikasikan bahwa analisis wacana memperlakukan berbagai materi secara linguistik maupun non-linguistik, seperti pidato, laporan, manifesto, peristiwa sejarah, wawancara, kebijakan, ide, bahkan organisasi serta institusi. Berbagai materi tersebut dipandang melalui ‘teks’ atau ‘tulisan’ yang memungkinkan subjek untuk merasakan objek dunia, kata-kata, dan praktik.

Secara umum, teori wacana kritis terlibat dengan tiga tradisi pemikiran yang berbeda, yakni strukturalis, hermeneutis dan Marxis. Pada permulaan konsep teori wacana kritis, tradisi pemikiran strukturalis memiliki pengaruh besar bagi perkembangannya meskipun terdapat kelemahan dan kritik pembaharuan setelahnya. Para pemikir strukturalis seperti Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson dan Louis Hjelmslev memusatkan perhatian pada acara di mana makna dan penandaan merupakan produk dari sistem tanda. Berbeda dengan teori bahasa yang menyatakan bahwa kata-kata dan bahasa mengacu pada dunia objek, strukturalis berpendapat bahwa makna bergantung pada hubungan antara elemen yang berbeda dari suatu sistem.

Tradisi hermeneutis dalam pendekatan diskursif menentang pandangan positivis, behavioris dan strukturalis tentang kehidupan sosial yang hanya berfokus terhadap fakta dan tindakan yang dapat diamati, sehingga kerap kali mengabaikan makna sosial sehari-hari demi hukum struktural yang tidak disadari. Tokoh hermeneutis seperti Martin Heidegger dan Charles Taylor memiliki pandangan bahwa tujuan dari analisis diskursif ialah menemukan aturan-aturan maupun konvensi yang spesifik secara historis dapat menyusun produksi suatu makna dalam konteks sosial tertentu.

Perkembangan teori wacana juga turut diisi oleh pemikiran dari tradisi Marxisme. Aspek yang mencirikan pendekatan Marxis terhadap wacana ialah dari cara di mana gagasan, bahasa, dan kesadaran dianggap sebagai fenomena ideologis yang harus dijelaskan berdasarkan proses ekonomi dan politik. Hal ini turut berkaitan dengan peran agen sosial dalam mengkritik dan menentang hubungan eksploitasi dan dominasi.

### ***Analisis Diskursus Norman Fairclough***

Analisis wacana yang dikembangkan oleh Norman Fairclough tidak terlepas dari pemikiran strukturalisme dari Ferdinand de Saussure. Saussure sebagai seorang sastrawan berpendapat bahwa, bahasa merupakan sistem yang memproduksi suatu makna terdiri dari penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) yang mengikat satu sama lainnya. Fairclough sebagai pemikir post-strukturalis mengkritik pemikiran wacana Saussure, yakni menitikberatkan Bahasa sebagai praktik dari kekuasaan. Pemikiran Saussurian dengan paradigma wacana strukturalisme yang menganggap bahwa bahasa ialah sistem yang eksklusif

dan statis sehingga terbebas dari nilai. Hal ini yang dikritik oleh Fairclough dan pemikiran post-strukturalis lainnya yang menganggap bahwa pemikiran strukturalis masih terjebak dalam “*scientific dream*” sebab Bahasa terbebas dari nilai. Padahal dalam implementasinya, bahasa sendiri berwujud fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu (Munfarida, E. 2014).

Berangkat dari pemikiran ini, Norman Fairclough sebagai salah satu pemikir post-strukturalis menganggap bahwa bahasa tidak pernah netral. Hal ini disebabkan karena bahasa tidak terlepas dengan bagaimana konstruksi suatu bahasa dapat dibentuk dan terbentuk dari adanya relasi sosial. Melalui interaksi serta pranata sosial yang terdapat di tengah masyarakat, secara tidak langsung akan menghasilkan wacana yang kemudian menjadi konsensus bagi masyarakat itu sendiri. Eksistensi lahirnya suatu bahasa juga dianggap erat dengan motif kekuasaan dan kepentingan dari kelompok tertentu. Hal inilah yang menjadikan realita sosial yang dibangun oleh Bahasa tidak lagi dipahami sebagai realitas yang sesungguhnya, melainkan realitas tersebutlah yang dikonstruksi (Eriyanto, 2011).

Menyadari bahwa bahasa tidak pernah netral, Fairclough membagi analisis diskursus berdasarkan tiga dimensi yang berbeda. Berdasarkan argumen yang dikutip dari Jorgensen dan Phillips, pendekatan Fairclough yang berorientasi terhadap pemaknaan suatu teks berusaha mengakulturasi tiga tradisi yang berbeda: 1) analisis tekstual terkait linguistik seperti Michael Halliday; 2) analisis makro-sosiologis dari praktik sosial seperti teori Foucault dan 3) tradisi interpretative mikro-sosiologi dalam disiplin ilmu sosiologi. Melalui gabungan antara ketiga tradisi yang berbeda, menjadikan Fairclough tidak hanya memandang bahasa sebagai tradisi linguistik yang bebas nilai. Melainkan turut mempertimbangkan kondisi sosio-kultural yang diyakini melatarbelakangi munculnya suatu teks (Munfarida, E. 2014).

Sedangkan ketiga dimensi tersebut yakni dimensi teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Fairclough mendasari pemikirannya dengan melihat teks dianalisis secara linguistik dan kohesivitas, yakni bagaimana antar kalimat tersebut dapat terangkai sehingga menghasilkan suatu pemaknaan tertentu. Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan analisis narasi dari Anies Baswedan pada debat ke satu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang didasari oleh ketiga dimensi analisis diskursus dari Norman Fairclough.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk dapat mengeksplor lebih jauh, penulisan pada artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif serta menggunakan data sekunder. Pendekatan kualitatif sendiri berfokus dengan mengandalkan analisis secara mendalam terhadap suatu fenomena yang dilakukan hingga ke akar permasalahannya. Melalui gaya penelitian kualitatif, penulis berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat mengdepankan proses, peristiwa, dan otentisitas. Apabila dipandang dari segi epistemologis, penelitian kualitatif memiliki sikap dengan menjalin interaksi secara intens dengan realitas yang ditelitinya (Somantri, 2005).

Guna menambah kesahihan artikel serta memperluas pisau analisis, penulis menggunakan pengetahuan maupun teori yang diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder sendiri ialah data yang diperoleh melalui orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam artikel ini yakni berupa buku, jurnal, dan portal berita. Sedangkan untuk kajian utama penelitian, penulis mengambil tayangan dari laman internet.

Oleh karenanya, peristiwa yang dianalisis pada artikel ini ialah narasi yang dilontarkan oleh Anies Rasyid Baswedan selaku Calon Gubernur DKI Jakarta melalui debat terbuka Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang disiarkan oleh Netmediatama melalui laman *Youtube*. Narasi Anies pada debat tersebut menjadi suatu fenomena yang menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam sebab dapat membawa isu populisme di tengah perspektif yang berbeda terkait suatu kebijakan yang sedang dikritisi. Melalui adanya fenomena ini, penulis membedah secara lebih dalam secara khusus dengan turut mengadopsi pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena banjir dan penggusuran menjadi salah satu topik pada Debat I Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Kembali pada hasil temuan analisis, penulis menggunakan analisis diskursus dari Norman Fairclough guna melihat bagaimana Anies Baswedan selaku Calon Gubernur DKI Jakarta memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat permukiman dan penggusuran terhadap banjir di Jakarta. Pada hasil analisis kali ini, penulis akan membagi kajian narasi sesuai ketiga dimensi diskursus dari Fairclough.

### **Dimensi I: Teks**

Pada dimensi ini, diksi-diksi yang digunakan oleh seseorang atau kelompok yang memproduksi narasi dianalisis untuk mengetahui bagaimana kelompok tersebut menginterpretasikan sebuah fenomena atau objek yang hendak dimaknai. Pemaknaan tersebut dapat menggunakan unsur kesusastraan seperti halnya majas, kiasan, kata ganti subjek, frasa, dan sebagainya. Fairclough sendiri menganalisis teks berdasarkan tiga unsur. Untuk itu, adapun hasil analisis penulis sebagai berikut.

### ***Representasi***

Pada debat tersebut, Anies Baswedan menggambarkan kehidupan masyarakat bantaran Sungai Ciliwung pada zaman kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai berikut:

*“Saya datang ke Bukit Duri ikut dalam syukuran sama warga Bukit Duri yang menang di PTUN menghadapi Pemda DKI Jakarta. Apa yang terjadi di tempat itu? Ketidakadilan dilaksanakan”*

Berdasarkan konsep representasi dari Fairclough, Anies Baswedan mencoba menggambarkan kehidupan warga DKI Jakarta khususnya di Bukit Duri yang mengalami ketidakadilan. Hal ini merujuk pada peristiwa penggusuran pada 26 September 2016 yang dialami oleh masyarakat Bukit Duri oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka upaya kebijakan normalisasi Sungai Ciliwung. Di satu sisi, upaya normalisasi sungai merupakan salah satu tindakan pemerintah guna merealisasikan sistem tata ruang dan wilayah yang lebih madani. Namun di sisi lain, penggusuran bagi warga Bukit Duri dinilai tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan proses hukum penggusuran (maladministrasi).

Meskipun Pemkot Jakarta Selatan telah memberikan surat peringatan ketiga (SP 3) kepada ratusan pemilik rumah di Bukit Duri, akan tetapi warga tersebut menolak penggusuran terhadap huniannya yang telah ditinggali selama bertahun-tahun. Seperti halnya cerita yang dinyatakan oleh Anies pada debat tersebut,

*“Di Ciliwung kemarin seorang Ibu datang, ‘Pak Anies, Ayah Saya dilahirkan di titik ini, di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu”*

Hal inilah yang menjadikan warga Bukit Duri yang tergusur mengajukan banding yakni gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). Gugatan berupa uang ganti tunai sebesar Rp 200 juta per orang kepada warga sempat diubah oleh pemerintah dengan menunaikan gugatan tersebut berupa program *Community Action Plan* (CAP). Namun, warga Bukit Duri sebagai *class action* terus berusaha mengajukan gugatan berupa penggantian uang tunai langsung kepada warga selama satu tahun, hingga akhirnya dikabulkan pada 25 Oktober 2017 oleh PTUN. Melalui fenomena ini, Anies menggambarkan realitas yang ada – yakni tindakan penggusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – yang justru bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Kelompok masyarakat bantaran Sungai Ciliwung digambarkan melalui warga Bukit Duri, sehingga memiliki kesan mereka ialah bagian dari Jakarta yang tidak perlu disingkirkan secara paksa dan masih memiliki hak sebagai warga yang berbangsa dan bernegara,

### **Relasi**

Melalui unsur relasi, Anies Baswedan memperlihatkan bagaimana konstruksi hubungan antara dirinya dengan audiens hingga akhirnya teks atau wacana tersebut dapat disampaikan. Pada konteks Debat I Pilkada DKI Jakarta 2017, penulis dapat memandang bagaimana Anies menghubungkan pola gabungan antar aktor yang berkepentingan melalui kalimatnya sebagai berikut:

*“Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat, (pemerintah justru) tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat yang miskin, lemah, (pemerintah bersikap) tajam. Prosedur dilanggar demi kepentingan yang menggeser”*

Berdasarkan teks tersebut, Anies Baswedan memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan yang ada pada saat itu. Kekuasaan – yang dalam hal ini pemerintah – dianggap memiliki sistem yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rakyat digambarkan oleh Anies sebagai pihak yang miskin dan lemah, yang justru diperlakukan dengan tajam oleh pemerintah. Adapun maksud ‘tajam ke bawah’ bagi Anies diibaratkan sebagai sesuatu hal yang menyakitkan bagi masyarakat. ‘Bawah’ mengisyaratkan adanya hierarkis kehidupan bernegara bahwa masyarakat memiliki posisi di bawah dibandingkan dengan pemegang kekuasaan, yakni berupa pejabat maupun aktor-aktor yang bermain. Sikap ‘tajam’ pemerintah dianggap Anies berupa penggusuran yang dilakukan secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warga Bukit Duri. Penggusuran tersebut sebagaimana yang telah disinggung pada pernyataan sebelumnya, dinilai tidak manusiawi. Gugatan yang dikabulkan oleh PTUN kepada warga Bukit Duri juga menjadi salah satu indikasi, bahwa seyogyanya pemerintah melakukan tindakan yang menyakitkan. Sedangkan sikap pemerintah yang ‘tumpul’ digambarkan oleh Anies, mengindikasikan bahwa kebijakan

maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah semakin melemah kepada aktor yang berkepentingan maupun petinggi-petinggi negara yang secara hierarkis memiliki posisi yang lebih tinggi dari masyarakat miskin dan lemah.

Anies turut memperlihatkan relasinya dengan aktor yang berkepentingan (pemerintah yang menjabat) dengan menawarkan perbedaan kebijakan yang dinilai lebih dekat kepada masyarakat dan tentunya tidak tajam ke bawah.

*“Kita akan melakukan apa yang disebut dengan Urban Renewal, peremajaan kota, penataan ruang, bukan dikosongkan apalagi tanpa mempertimbangkan satu prosedur rasa keadilan dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta”*

*Urban Renewal* sebagaimana yang dimaksud Anies, merupakan suatu program kerja yang diusung oleh Anies pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Program ini terinspirasi dari tindakan Pangeran Diponegoro yang mengusung konsep penertiban, bukan penggusuran. Dengan menggunakan Bahasa Inggris dalam konsep penataan ruangnya, Anies Baswedan memiliki kesan yang modern dan sama sekali berbeda dengan konsep penggusuran yang memiliki konotasi cenderung negatif dan kolot. Terlebih mengingat kesan penggusuran yang sempat ramai dan menjadi fenomena utama selama kepemimpinan Jakarta dipegang oleh Basuki Tjahaja Purnama. Anies Baswedan juga kembali menegaskan kata ‘prosedur’ serta ‘keadilan’ sehingga memberikan kesan pada dirinya sebagai pribadi yang taat terhadap hukum, membangun konstruksi sosial terkait konsep ‘*Urban Renewal*’ kepada masyarakat, sekaligus memperjelas perbedaannya dengan realita sosial yang terjadi pada saat itu.

### ***Identitas***

Narasi Anies pada debat tersebut secara implisit turut memperkuat identitas dirinya. Melalui adanya undur identitas, narasi yang dilontarkan oleh Anies merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas antara diri Anies sendiri dengan masyarakat sehingga dapat memperlihatkan sejauh mana dirinya dapat mengidentifikasi dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat.

Berdasarkan berbagai kutipan dari narasi Anies tersebut, penulis melihat bahwa Anies Baswedan memiliki sikap yang berlawanan dengan pemerintah kala itu dan menggambarkan dirinya sebagai pendukung masyarakat yang mengalami penggusuran. Anies berusaha mengkonstruksi identitas figurnya yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui penggunaan narasi-narasi yang mencerminkan pribadi yang berpendidikan dan tutur kata yang lebih baik seperti halnya konsep ‘menata’ dan ‘*urban renewal*’ daripada ‘menggusur’. Selain itu, meskipun Anies sempat menjabarkan bahwa latar belakang pendidikan ekonomi beliau tidak selaras dengan jabatan yang dipegangnya, yakni sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, namun dirinya meyakinkan masyarakat bahwa Anies tetap berada dipihak masyarakat miskin dan mengalami penggusuran.

### **Dimensi II: Praktik Diskursif**

Pada dimensi kedua ini, Fairclough menjelaskan praktik diskursif sebagai dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Yakni bagaimana kesan yang ingin

ditampilkan oleh kelompok yang memproduksi makna terhadap sebuah fenomena atau objek yang ingin dimaknai.

Pada analisis kali ini, penulis melihat narasi yang diangkat oleh Anies Baswedan sarat akan konsep figur populis. Populisme sendiri telah menjadi konsep yang kerap digunakan oleh banyak bakal calon pada saat pemilihan berlangsung guna meraih simpatisan yang dikehendaki. Menurut Canovan (1999), populisme merupakan seruan kepada ‘rakyat’ terhadap struktur kekuasaan yang mapan serta ide-ide maupun nilai dari masyarakat yang dominan. Atau secara lebih ringkas, digambarkan oleh Mudde sebagai ‘elit yang korup’ dengan ‘rakyat suci’. Guna menentang penindasan kaum elite, maka rakyat membutuhkan sosok aktor politik yang cukup berani guna menyuarakan dan mewakili suara ‘rakyat’.

Pada segi proses produksi teks, Anies Baswedan tidak lain ialah sosok aktor politik yang berani untuk bertarung melawan rezim yang berkuasa kala itu, yakni Gubernur DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahaja Purnama. Beliau melalui narasinya memberikan satir kepada pemerintah yang menjabat akibat tindakannya yang dinilai tidak manusiawi dan melanggar peraturan hukum dalam menggusur. Untuk itu, beliau terus mengangkat fenomena penggusuran sebagai suatu tindakan penyimpangan sosial. Padahal, apabila ditarik secara garis besar penggusuran tersebut dapat memberikan kehidupan masyarakat yang lebih baik sebab Basuki pada debat tersebut turut mengemukakan bahwa pemindahan diiringi dengan penghidupan masyarakat penggusuran dengan lebih layak. Menyadari hal ini, Anies Baswedan tidak lagi menggunakan kata ‘menggusur’ melainkan ‘menata’, ‘urban renewal’, dan kata pengganti lainnya yang memiliki kiasan lebih baik.

*“Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin,  
yang ingin kita lakukan adalah menghilangkan kemiskinan”*

Pernyataan tersebut telah menjadi suatu pandangan baru bagi masyarakat terhadap masyarakat bantaran sungai, sebab identitas berikut cenderung berkonotasi negatif dan kerap kali mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah. Anies Baswedan membawa imbuhan ‘kemiskinan’ pada kata ‘orang miskin’ sehingga mengisyaratkan bahwa pemahamannya terkait penggusuran tidaklah identik dengan orang miskin, melainkan secara lebih luas hendak memberantas kemiskinan secara menyeluruh. Perubahan konsep penggusuran tersebut juga menjadi semakin hal yang menguatkan bagi identitas Anies sebagai sosok yang *down to earth* dan berpihak pada rakyat kecil.

Sedangkan pada proses konsumsi teks, Anies berhasil menggiring opini masyarakat yang mengalami penggusuran untuk menolak terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya Anies pada kunjungan ke Bukit Duri dan terdapat seorang warga yang menceritakan kisahnya yang digusur akibat penertiban bantaran sungai. Tindakan tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih terhadap Anies sebagai sosok yang hendak mewakili suara rakyat yang digusur.

### **Dimensi III: Praktik Sosiokultural**

Patut diketahui bahwasanya suatu praktik sosial budaya merupakan interpretasi dari praktik produksi teks. Setiap teks dalam wacana/ pemberitaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik berupa kekuasaan dan ideologi, budaya (nilai dan identitas) yang sekiranya

mempengaruhi institusi media. Sehubungan dengan hal tersebut Norman Fairclough membuat 3 level analisis dalam praktik sosial budaya atau *sociocultural practice*.

### ***Situasional***

Sedangkan pada tingkat situasional, hal ini merujuk pada waktu pada saat teks diproduksi. Dalam hal ini, Anies mengeluarkan narasi pada saat masa kampanye berlangsung. Beliau menggunakan kondisi serta situasi yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2017 sehingga dapat mengkonstruksi realitas sosial sesuai dengan perspektif Anies. Dalam hal ini, penggusuran dipandang Anies sebagai suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan jauh dari segi kemanusiaan.

Selain itu pada periode 2016 hingga 2017, penggusuran sedang marak terjadi akibat adanya kebijakan normalisasi sungai. Tidak sedikit media massa yang memberitakan proses penggusuran di berbagai wilayah seperti Kampung Pulo, Bidara Cina, Sunter, Kalijodo, Kampung Akuarium, serta Bukit Duri. Normalisasi sungai sendiri ialah mengembalikan kondisi sungai yang lebar menjadi 35-50 meter sehingga saat hujan deras turun, Jakarta tidak akan mengalami banjir sebab kapasitas air yang ditampung lebih banyak. Normalisasi merupakan proses pembuatan dinding beton di sisi sungai sedalam 10-12 meter. Namun, upaya betonisasi yang bertujuan untuk menertibkan sempadan sungai sebagaimana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan, justru dinilai masyarakat sebagai tindakan kriminal. Bahkan, warga mengadakan perlawanan berupa aksi demonstrasi serta mural yang bertuliskan “Di Jakarta, beton lebih subur daripada pohon” serta “#SaveBukitDuri Menolak Tunduk”. Berangkat dari hal inilah kampanye Anies lebih menekankan kepada peremajaan sungai, bukan penggusuran.

### ***Institusional***

Pada tingkat institusional, Fairclough menganalisa sebuah institusi atau organisasi yang dapat berasal dari dalam diri sang pembuat wacana atau kekuatan eksternal di luar pihak yang turut menentukan proses produksi teks. Dalam kasus ini, narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Anies tidak lain ialah wujud keresahan dari masyarakat bantaran sungai yang mengalami ketidakadilan sosial. Konstruksi dari narasi yang dibangun oleh Anies juga tidak terlepas dari dirinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga memiliki beliau turut mengkritisi tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Meskipun kewenangannya berbeda, namun Anies pada Debat I Pilkada DKI Jakarta sebagai calon gubernur menawarkan kebijakan ‘*urban renewal*’ sebagai representasi terhadap ideologinya.

### ***Sosial***

Setiap insan manusia yang lahir di dunia telah membawa hak-hak dasar atau yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau biasa disebut dengan hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut maka disini berarti setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dalam menjalani hidup, tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, dan perbedaan lainnya.

Perlindungan terhadap warga negara juga tercantum didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup dan berhak untuk tidak disiksa, yang mana hal ini menandakan bahwa segala bentuk tindakan represif atau tindakan

yang berbau dengan kekerasan tanpa sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat dikatakan sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia.

Pada hakikatnya sebenarnya pendapat yang dikeluarkan oleh sosok Anies Baswedan sah-sah saja karena berkaca dari rasa welas asih dan rasa kemanusiaan yang timbul dari sesama umat manusia yang merupakan makhluk sosial, ditambah dinamika yang terjadi di lapisan masyarakat yang terkena dampak pada saat itu cukup memanas dikarenakan seakan-akan pemimpin pada saat itu tidak pandang bulu dan tidak berperikemanusiaan dalam bertindak, maka dari itu kondisi sosial tersebut pada saat itu bisa juga dimanfaatkan oleh calon gubernur Anies Baswedan pada saat itu untuk melakukan tindakan yang bisa menguntungkan baik dalam segi sosial maupun politik.

## KESIMPULAN

Melayangkan sebuah pernyataan, kini tidak lagi tentu akan terbebas dari nilai. Narasi Anies terhadap fenomena penggusuran telah menjadi bukti bahwa Fairclough dengan pemikiran post-strukturalisnya menganggap Bahasa sebagai praktik dari kekuasaan. Setiap kata maupun kalimat memiliki makna yang mendalam dan dapat dikaji lebih lanjut sebab dibaliknya terdapat kepentingan-kepentingan dari pihak penguasa yang kemudian ditujukan kepada konsumen teks.

Narasi Anies pada debat tersebut secara tidak langsung membangun suatu identitas yang termarginalkan. Dalam hal ini, Anies mengangkat warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung sebagai suatu identitas yang mengalami penindasan oleh elite yang berkuasa. Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep populisme, khususnya terkait *radical-left populism*. Melalui adanya unsur identitas, narasi yang dilontarkan oleh Anies merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas antara diri Anies sendiri dengan masyarakat sehingga dapat memperlihatkan sejauh mana dirinya dapat mengidentifikasi dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat serta menjadikan sosok dirinya sebagai tokoh yang berani berdiri bagi *'the people'* atau rakyat.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021*. Jakarta.
- Canovan, M. (1999) 'Trust the people! populism and the two faces of democracy', *Political Studies*. doi: 10.1111/1467-9248.00184
- de Vreese, Claes H.; Esser, Frank; Aalberg, Toril; Reinemann, Carsten; Stanyer, James (2018). *Populism as an Expression of Political Communication Content and Style: A New Perspective*. *The International Journal of Press/Politics*, (), 194016121879003–. doi:10.1177/1940161218790035
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS
- Howarth, D. (2000). *Concepts in the Social Sciences: Discourse*. Open University Press. Buckingham, Philadelphia
- la Torre, C. D. (2019). Is left populism the radical democratic answer?. *Irish journal of sociology*, 27(1), 64-71.
- Mudde, C. (2004) 'The Populist Zeitgeist', *Government and Opposition*. doi: 10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x.

- Muhtadi, M., & Anggara, A. (2020). Evaluasi Proses Program Community Action Plan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Kampung Akuarium Jakarta Utara. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 6(1), 31-52.
- Munfarida, E. (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1-19.
- Parikesit, G. (2018). Penggusuran Bukit Duri, 25 Korban Tidak Ingin Hunian Tapi Uang. Dilansir dari Tempo.co melalui [https://metro.tempo.co/read/1127958/penggusuran-bukit-duri-25-korban-tidak-ingin-hunian-tapi-uang?page\\_num=3](https://metro.tempo.co/read/1127958/penggusuran-bukit-duri-25-korban-tidak-ingin-hunian-tapi-uang?page_num=3)
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Velarosdela, R. N. (2021). Kilas Balik Penggusuran Bukit Duri dan Realisasi Janji Anies Bangun Kampung Susun untuk Warga. Dilansir dari Kompas.com melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/07/14404451/kilas-balik-penggusuran-bukit-duri-dan-realisasi-janji-anies-bangun?page=all#:~:text=Penggusuran%20warga%20Bukit%20Duri%20dilakukan,10%2C%2011%2C%20dan%2012>
- Wahyuni, T. A. (2022). Mengerikan, Indonesia Sudah Darurat Sampah Plastik: Sehari Mencapai 64 Juta Ton, Nomor Dua Terbesar di Dunia. Dilansir dari Voi.id melalui <https://voi.id/bernas/137477/mengerikan-indonesia-sudah-darurat-sampah-plastik-sehari-mencapai-64-juta-ton-nomor-dua-terbesar-di-dunia>